

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN KETERAMPILAN BERPIKIR.

Oleh: Maria Montessori

ABSTRACT

The aim of Civic Education is to prepare students to be effective and responsible citizens. Implicit in that aim is the need to help students to become more competent as thinkers. This article tries to address the important of moving from lower-order thinking to higher order thinking in civic education program. Three kinds of thinking, that is critical thinking, problem solving and decision making are reviewed in this article and assumed by the writer as important feature for achieving the aim of civic education.

Key Words: *Civic education goals, thinking skills, lower-order thinking, higher-order thinking, critical thinking, problem solving, and decision making.*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan tentang kewarganegaraan telah menjadi perhatian dan perdebatan di berbagai negara untuk waktu yang lama. Hal ini tampak dari berbagai badan atau institusi yang dibentuk oleh masing-masing pemerintah untuk menangani masalah ini seperti *Commission on Citizenship* 1990 di United Kingdom, *Center for Civic Education*, 1991 di USA atau *Civic Expert Group* 1994 di Australia. Kesemua ini memperlihatkan bahwa upaya mendidik warga negara menjadi warga negara yang berpengetahuan dan aktif berpartisipasi dalam berbagai dimensi kehidupannya, tidak hanya penting bagi kelompok negara-negara berkembang atau *developing countries* seperti Indonesia, tapi juga bagi negara yang tergolong maju atau *developed Countries* seperti Amerika Serikat atau Inggris.

Bagi Indonesia saat ini, pembangunan karakter bangsa atau *nation state building* merupakan hal yang kiranya tidak bisa diabaikan lagi. Berbagai peristiwa dan sejarah yang dialami bangsa ini baik dimasa penjajahan, masa orde lama atau masa orde baru, bahkan di era reformasi saat ini, telah menyadarkan banyak orang bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita masih harus ditata dan diperbaiki untuk mencegah timbulnya peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan dimasa datang.

Untuk mewujudkan inilah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dianggap sebagai ujung tombak yang akan mendidik siswa menjadi warga negara yang diharapkan, sebagaimana dapat dilihat dalam tujuan PKn yaitu untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia yang memiliki wawasan, disposisi dan ketrampilan kewarganegaraan yang memadai, yang memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai dimensi kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia (*National Standard For Civic Education, 2000*).

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, dapat dilihat bahwa PKn mengandung beberapa dimensi seperti, pengetahuan, nilai, keterampilan dan juga partisipasi. Dalam tulisan ini hanya satu dimensi yang akan diperhatikan yaitu dimensi ketrampilan berpikir. Ada beberapa alasan kenapa ketrampilan berpikir merupakan hal yang harus mendapat perhatian dalam bidang studi ini. Pertama, peranan sebagai warga negara yang aktif dan berpartisipasi menuntut kemampuan dan ketrampilan berpikir yang baik. Apa yang harus dilakukan seorang dalam mengambil keputusan untuk memilih dalam pemilu atau menjadi saksi dalam suatu pengadilan, maupun menghadapi resiko dari setiap tingkah lakunya memerlukan analisa dan keterampilan berpikir yang benar. Sebagaimana Brown (1977) mengatakan, bahwa setiap warga negara seharusnya memiliki kemampuan untuk menganalisa implikasi politis dan etis dari setiap situasi kemanusiaan.

Alasan kedua berkaitan dengan pelaksanaan pengajaran PKn disekolah. Berdasarkan pengalaman banyak negara, terlihat bukti-bukti bahwa mengajarkan bidang studi ini bukanlah pekerjaan yang mudah, terutama apabila minat dan perhatian siswa tidak mendukung (Gilbert, 1996). Minat siswa ini berkaitan dengan anggapan mereka bahwa mempelajari PKn tidaklah menarik, karena sama sekali tidak menantang mereka untuk berpikir dan tidak memaksa mereka untuk menggunakan kemampuan pikir mereka secara maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Suwarma (1992) di Bandung tentang minat siswa dalam bidang studi sosial juga menunjukkan, bahwa mereka tidak suka dan bosan mempelajari pengetahuan sosial karena mereka hanya disuruh menghafal fakta-fakta yang sangat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa bidang studi yang hanya memberi prioritas berpikir pada tahap rendah seperti mengingat dan memahami saja menyebabkan siswa bosan dan ini membentuk anggapan bahwa bidang studi ini atau pengetahuan yang ada tersebut sebagai pengetahuan yang kurang penting dibanding dengan yang lain. Kalau hal ini berlangsung terus tentu merupakan suatu hal yang berbanding terbalik dengan tujuan diadakannya Pendidikan Kewarganegaraan.

Alasan terakhir adalah berkaitan dengan pemahaman yang akan diperoleh siswa dalam mempelajari materi yang ada dalam PKn. Siswa yang terlatih dalam menggunakan dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara maksimal tentang suatu topik seperti sejarah perjuangan dalam mencapai kemerdekaan, akan cenderung memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang makna sejarah yang dipelajarinya, tidak hanya untuk hidupnya saat ini tapi juga untuk masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan di atas, maka pengajaran PKn hendaklah memberi perhatian yang serius terhadap proses berpikir siswa. Berangkat dari proses berpikir pada tahap rendah (*lower-order thinking*) seperti

mengingat dan memahami kepada proses berpikir yang lebih tinggi (*higher-order thinking*) merupakan hal yang perlu untuk dilatih dan dikembangkan. Hal ini ditegaskan Gilbert (1996) bahwa pendekatan tradisional dalam mengajar yang hanya meminta siswa untuk menghafal dan menyebutkan kembali fakta-fakta dan konsep, tidak lagi sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan tentang kewarganegaraan sebagaimana disebutkan di atas.

Mengingat proses berpikir merupakan masalah yang cukup kompleks, maka dalam tulisan ini permasalahan yang ingin dikemukakan adalah proses berpikir atau jenis ketrampilan berpikir yang bagaimana yang sesuai atau relevan untuk pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan beberapa bentuk ketrampilan berpikir yang bisa diterapkan oleh guru atau pelaksana PKn di sekolah.

II. PEMBAHASAN

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa kemampuan untuk berpikir secara kritis merupakan atribut penting untuk sukses dalam kehidupan di abad 21. Hal ini bisa dimengerti, karena kompleksnya permasalahan kehidupan manusia saat ini baik dalam kehidupan pribadi, maupun dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, menyebabkan kemampuan berpikir yang diperlukan manusia untuk bisa menjawab tantangan yang ada juga menjadi semakin kompleks pula. Hanya orang yang bisa memanfaatkan daya pikirnya secara kritis dan kreatiflah yang dapat mencari berbagai alternatif bagi pemecahan masalah tersebut.

Sebagai lembaga pendidikan, sudah tentu sekolah dianggap sebagai institusi yang paling tepat dalam mengajarkan keterampilan berpikir ini kepada siswanya. Tidak hanya karena sekolah bertanggung jawab dalam membantu siswa untuk bisa *survive* dalam kehidupannya, tapi juga karena dalam dunia global saat ini siswa tidak hanya bisa memperoleh informasi saja melainkan juga cara berpikir dan sejumlah karakteristik moral seperti *open-mindedness, anticipation of complexity, resistance to stereotyping, inclination to empathize, non chauvinism, tolerance and sense of justice* (Wright, 1995). Dengan demikian pendidikan pun harus merespon keadaan tersebut dengan melatih dan memberi kesempatan kepada siswanya agar dapat mempergunakan dan mengembangkan kemampuan berpikirnya semaksimal mungkin. Karena itu berpikir secara kritis juga menjadi isu penting dalam pendidikan.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai salah satu bidang studi yang bertujuan untuk mendidik warga negara menjadi warga negara yang aktif dan partisipatif, sudah tentu juga perlu melatih siswa untuk berpikir pada taraf yang lebih tinggi. Kemampuan untuk berpikir secara kritis harus menjadi prioritas bagi bidang studi ini, karena aplikasi dari materi yang ada dalam bidang studi ini lebih menjebak atau tidak jelas bila dibandingkan dengan yang ada dalam matematik atau ilmu pengetahuan alam. Hal ini disebabkan karena konsep-konsep yang ada dalam ilmu pengetahuan sosial pada umumnya tidak dapat didefinisikan secara baku,

hubungan antar konsep pada umumnya juga tidak bersifat sebab akibat melainkan lebih bersifat korelasional, begitu juga prediksi yang bisa dibuat lebih bersifat probabilistik. Oleh karena itu dengan menggunakan kerangka berpikir kritis dan kreatif maka siswa akan dapat mengeksplorasi topik-topik yang ada dalam PKn seperti HAM, Demokrasi dan Keragaman suku dan budaya dengan lebih dalam lagi. Dengan melihat masalah itu dari berbagai perspektif, memberi kemungkinan akan terbentuknya pemahaman yang lebih baik dan juga membuka peluang untuk munculnya pemikiran tentang solusi terhadap masalah yang ada. Dengan demikian kerangka berpikir kritis dan kreatif merupakan kerangka berpikir yang tepat untuk bidang studi PKn.

Mengajarkan keterampilan berpikir kritis kepada siswa memang bukan pekerjaan yang mudah, akan tetapi bukan tidak bisa sama sekali. Solomon (1987) mengatakan bahwa siswa, adalah anggota dari suatu masyarakat, dan juga anggota dari berbagai kelompok sosial. Mereka dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya dan memiliki hak dan kewajiban disana. Dengan kata lain mereka telah mengalami proses sosialisasi tentang kehidupan bersama walau masih secara sederhana. Oleh karena itu siswa pada umumnya memiliki kemampuan untuk membahas dan memikirkan secara kritis sebagian besar topik-topik yang ada dalam PKn, dengan kata lain mereka telah memiliki pengetahuan awal tentang itu. Karena itu sekolah dapat lebih meningkatkan ketrampilan berpikir siswa kepada tingkatan yang lebih tinggi melalui proses belajar-mengajar yang terencana dengan baik.

Kemampuan berpikir secara kritis didefinisikan secara berbeda oleh berbagai ahli. Enis (1992) mendefinisikan berpikir kritis sebagai ‘*reasonably going about deciding what to believe and do*’. Dengan kata lain berpikir kritis berarti mampu menggunakan jalan pikiran yang benar dalam memutuskan apa yang akan diterima atau diyakini dan apa yang akan dilakukan atau diperbuat. Meskipun definisi itu terlihat sederhana akan tetapi secara implisit menyiratkan bahwa untuk sampai pada suatu putusan dan tindakan yang tepat, ada tahap lain yang dilalui terlebih dahulu. Sebagaimana Scriven & Paul (1992) mengemukakan bahwa *critical thinking is the intellectually disciplined process of actively and skillfully conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and/or evaluating information gathered from, or generated by observation, experience, reflection, reasoning, or communication as a guide to belief and action.*

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan suatu proses berpikir yang kompleks dan aktif, yang bersifat memperluas dan mengeksplorasi lebih dalam suatu masalah. Hal ini bisa dilakukan dengan memunculkan berbagai problem atau pertanyaan tentang masalah yang ada. Paul (1992) mengemukakan sebuah contoh tentang bagaimana berpikir secara kritis mengenai sebuah buku yang dibaca. Berbagai pertanyaan tentang buku itu dapat diajukan dalam membacanya seperti berikut: (1) Apakah tujuan dari penulisan buku ini?,

(2) Apa yang ingin dicoba pengarangnya untuk disampaikan pada pembacanya?, (3) Issu atau masalah apa yang diangkat dalam tulisan ini?, (4) Data, pengalaman, atau bukti apa yang diberikan penulisnya?, (5) Konsep apa yang digunakan untuk mengorganisasikan data dan pengalaman tersebut?, (6) Apa yang dipikirkan pengarang tentang dunia ini?, (7) Apakah pemikirannya itu berimbang jika dilihat dari perspektif kita sendiri?, (8) Bagaimana kita bisa memahami perspektifnya itu untuk menghargai apa yang telah dikatakannya?

Berdasarkan contoh diatas maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa berpikir kritis berarti juga berpikir tentang apa-apa yang kita pikirkan. Akan tetapi meskipun bersifat eksploratif, berfikir kritis ada juga aturan atau standarnya. Dalam hal ini lebih lanjut Paul mengatakan bahwa berpikir kritis tidak hanya sekedar berpikir tetapi berpikir yang memerlukan peningkatan kemampuan pribadi dan peningkatan kemampuan itu berasal dari ketrampilan-ketrampilan yang memiliki standar tertentu. Dengan demikian berpikir secara kritis tidak berarti berpikir secara bebas tanpa ada aturan tertentu.

Contoh di atas juga memperlihatkan bahwa berpikir kritis berarti kita mencoba melihat sesuatu dari berbagai sudut dan tahap, sehingga pada akhirnya sampai pada suatu keputusan. Hal yang sama dapat dilakukan dalam membahas topik-topik yang ada dalam PKn, dengan begitu siswa akan mempunyai kesempatan untuk membangun pengetahuan yang benar dengan kemampuan dan ketrampilan berpikir yang dimilikinya.

Dalam konteks berpikir kritis ini terdapat beberapa kegiatan atau aktifitas yang dapat dilakukan diantaranya: (1) Mengetahui atau memahami pandangan tertentu tentang sesuatu masalah atau isu, (2) Memisahkan antara fakta dan nilai, (3) Mendeteksi bias atau pandangan yang mengandung subjektifitas, (4) Mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat dari suatu masalah, (5) Menyusun generalisasi, (6) Memberikan saran untuk pemecahan masalah, (7) Membuat kesimpulan.

Bila hal-hal di atas dikaitkan dengan tujuan PKn, maka berpikir kritis merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Warga negara perlu memiliki kemampuan untuk membedakan antara tuntutan yang substansial tentang sesuatu dengan yang tidak, mampu menilai keakuratan informasi yang diterimanya, mampu untuk menentukan tingkat kebenaran suatu pernyataan, mampu memisahkan antara informasi yang relevan dengan yang tidak, atau mengetahui unsur subjektif yang ada dalam suatu pernyataan.

Mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangannya. Carr (1990) berpendapat bahwa mengajarkan keterampilan ini secara terpadu dengan materi pelajaran yang akan disampaikan terbukti lebih efektif dari pada diajarkan secara tersendiri. Dengan begitu guru harus merancang kegiatan belajar sedemikian rupa sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan yang merangsangnya untuk mampu berpikir secara kritis dan

kreatif. Untuk itu pemilihan strategi pengajaran yang tepat merupakan suatu keharusan. Sebagai contoh, kemampuan berpikir kritis dapat di rangsang melalui refleksi yang dilakukan siswa. Dari pada meminta siswa menghafal pasal-pasal tentang hak azazi manusia atau HAM dalam perundang-undangan yang ada, akan lebih baik meminta mereka mengemukakan pendapatnya tentang HAM setelah mereka mempelajari apa itu HAM. Di samping strategi pembelajaran yang tepat, belajar berpikir kritis akan lebih baik bila didukung oleh adanya pengalaman yang berhubungan dengan materi tertentu.

Buchanan (1994) mengatakan bahwa mengintegrasikan kemampuan berpikir secara kritis di dalam kelas dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu: (1) memasukan dalam rencana pelajaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan, (2) memberi contoh sambil mempraktekan bagaimana berpikir secara kritis yang benar dalam kelas, dan (3) merancang kegiatan yang akan melibatkan siswa dalam menggunakan kemampuan berpikirnya. Berdasarkan pengalamannya Buchanan menyimpulkan bahwa siswa mempunyai kemampuan untuk melakukannya bila guru memang memberi perhatian untuk itu.

Ketrampilan berpikir lain yang juga penting bagi PKn adalah *problem solving* dan *decision making*. Kedua bentuk ketrampilan ini termasuk kedalam kemampuan berpikir kritis, akan tetapi bila berpikir kritis dapat dipandang sebagai proses berpikir yang bersifat meluas atau mengeksplorasi secara lebih mendalam, sedangkan *problem solving* lebih merupakan proses yang berkelanjutan tapi lebih dangkal sifatnya

Problem solving atau keterampilan berpikir dalam memecahkan masalah merupakan hal yang perlu dilatihkan pada siswa dalam mempelajari PKn karena warga negara diharapkan dapat mengatasi dan mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapinya. *Problem solving* mengandung arti mencari penjelasan penjelasan tentang fenomena yang diobservasi, atau mengajukan beberapa pertanyaan yang telah tersusun dan tidak mengandung kontroversi dengan menggunakan bukti-bukti yang ada.

Sternberg dalam Solomon (1987) mengidentifikasi beberapa aspek dalam *problem solving* yaitu: (1) mengenal atau menyadari tentang masalah yang ada, (2) mengidentifikasi, menyeleksi dan menggabungkan tugas-tugas khusus yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu, (3) mengumpulkan dan memilah informasi atau sumber yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah, (4) memantau kemajuan dan menggunakan umpan balik eksternal untuk merevisi pendekatan yang digunakan terhadap masalah itu.

Costa (1984) lebih mengoperasionalkanya dengan mengemukakan bahwa komponen utama dari jenis keterampilan berpikir ini adalah perencanaan akan tindakan yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah yang ada, yang kemudian diikuti dengan pelaksanaan tindakan, memantau kemajuan atau keberhasilan yang didapat, kemudian refleksi seberapa baik rencana itu berhasil. Melalui empat langkah di atas

kemampuan berpikir siswa dilatih untuk mencari solusi atau pemecahan dari masalah yang ada. Apabila keempat langkah itu tidak dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang jelas (*clear*) maka keputusan harus diambil.

Problem solving dapat diaplikasikan kepada siswa melalui berbagai topik yang ada dalam PKN baik siswa belajar secara individual ataupun belajar dalam kelompok. Akan tetapi lebih baik bila dalam menggunakan proses berpikir ini siswa dihadapkan pada suatu tugas yang harus diselesaikannya, dan mereka mempunyai sikap positif tentang itu, yaitu keyakinan bahwa mereka akan dapat melakukannya.

Keterampilan berpikir untuk memutuskan sesuatu berdasarkan informasi yang didapat atau *decision making skill* merupakan ketrampilan berpikir yang juga penting bagi PKN. Brophy (1990) mengatakan bahwa dibandingkan dengan bidang studi lain maka keterampilan berpikir dalam mengambil keputusan merupakan hal yang sangat krusial bagi Pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu guru sebaiknya menyusun rencana pembelajarannya dengan melibatkan siswa yang akan merangsangnya untuk melatih keterampilan ini.

Decision making merupakan menentukan pilihan yang rasional terhadap beberapa alternatif pada suatu masalah yang ada, dimana pilihan yang rasional itu didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan informasi yang ada. Keputusan yang diambil bisa saja hanya menyangkut kehidupan pribadi atau yang berhubungan dengan issue publik dan sekali keputusan diambil mempengaruhi pada aksi individu.

Naylor dan Diem (1987) menyatakan untuk bisa melakukan ketrampilan ini maka ada 8 langkah yang diperlukan yaitu: (1) mengenal situasi dimana sebuah keputusan harus diambil, (2) memperjelas masalah yang ada, (3) identifikasi nilai-nilai yang relevan, (4) perjelas tujuan yang diinginkan, (5) ajukan dan pertimbangkan beberapa alternatif yang tersedia, (6) ramalkan kemungkinan akibat positif dan negatif dari setiap alternatif yang tersedia, (7) pilih alternatif yang terbaik berdasarkan analisa dan kemungkinan akibat yang telah diperhitungkan, (8) ambil keputusan dan evaluasi akibat yang ditimbulkannya.

Aktifitas dalam *decision making* dan *problem solving* menyediakan kesempatan yang sebenarnya bagi siswa untuk bisa terlibat dalam kegiatan berpikir secara kritis, dan ini merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan warga negara. Menurut Brophy (1990), banyak para pendidik dibidang ilmu sosial percaya bahwa dengan menyusun atau merancang program pengajaran dalam kerangka berpikir kritis, *problem solving* dan *decision making*, akan mampu mencapai banyak tujuan yang telah digariskan. Hal ini berarti berpikir pada taraf yang lebih tinggi atau *higher-order thinking* memberi kemungkinan untuk mewujudkan tujuan PKN. Untuk itu bukanlah materi yang baru yang diperlukan guru, tetapi yang lebih penting adalah adanya perhatian yang lebih terhadap proses berpikir yang tepat yang diperlukan dalam membahas setiap topik.

III. PENUTUP

Tujuan yang hendak dicapai oleh Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menghendaki perlunya memberi perhatian terhadap keterampilan berpikir siswa. Pengajaran PKn yang hanya terlaksana dengan menggunakan proses berpikir tahap rendah tidak akan efektif dalam mewujudkan tujuan pengajaran PKn. Oleh karena itu guru dapat menstimulasi kemampuan berpikir siswa kearah kemampuan berpikir yang lebih tinggi dengan menyusun program pembelajarannya dalam kerangka berpikir kritis, *problem solving* dan *decision making*. Ketiga bentuk ketrampilan berpikir ini tidak hanya relevan bagi PKn tapi juga akan bermanfaat bagi perkembangan kemampuan berfikir siswa secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, B.F. 1977. *The Case for Citizenship Education*. New York: McGraw-Hill.
- Brophy, Jere. 1990. *Teaching Social Studies for Understanding and Higher-Order Applications*. The university of Chicago; The Elementary School Journal Volume 90. Nomor 4.
- Buchanan, Anne. 2000. *Integrating Critical Thinking Skills into the Classroom*. Working Paper.
- Carr, K.1990. *How can we teach critical thinking ?* ERIC Digest. (Eric No. ED326304)
- Costa, A.L. 1984. *Mediating the metacognitive*. *Educational leadership*. Volume42, Nomor 3.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2000. *Standar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta.
- Ennis, R. 1992. *Critical Thinking. What is it? Proceeding of the Forty-Eight Annual Meeting of The Philosophy of Education Society*. Denver, Colorado. March 27-30.
- Gilbert, Rob (Ed). 1996. *Studying Society and Environment*. Melbourne: Macmillan Education Australia PTY.
- Kaltsounis, T. 1987. *Teaching Social Studies in the Elementary School: The basic for Citizenship*. New York: Prentice Hall.
- Naylor, D. & Diem, R. 1987. *Elementary and Midle School Social Studies*. New York: Random House.
- Paul, Richard .1992. *Critical Thinking : Basic Questions and Answers*. Working Paper.
- Scriven, M., & Paul, R. 1992. *Critical Thinking Defined*. Handout.
- Solomon, Warren. 1987. *Improving Students' thinking skills through Elementary Social Studies*. The University of Chicago: The Elementary School Journal. Volume 87 Nomor 5.
- Suwarma .1991. *Pengembangan kemampuan Berpikir dan Nilai Dalam Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung. FPS-IKIP Disertasi
- Wright, Ian. 1995. *Teachers, Critical Thinking and Global Education*. Working Paper.